

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

PSI Tolak DKI Libatkan Investor

Gambir, Warta Kota

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian Untayana menolak pembiayaan proyek pengelolaan sampah melalui Intermediate Treatment Facility (ITF) dikerjakan pihak ketiga.

Apabila menggandeng investor untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut, swasta akan menarik tipping fee pengelolaan sampah kepada Pemprov DKI Jakarta, sehingga pemerintah akan merugi.

Menurut dia, perikatan atas investasi biaya pembangunan sebesar Rp 5 triliun itu dapat membuat tipping fee tersebut berlangsung dalam kurun waktu 20-30 tahun. Hal ini sesuai dengan batas waktu yang dimungkinkan dalam perjanjian di Indonesia.

"Jika saat ini Jakarta memproduksi 8.000 ton sampah tiap

harinya dan 1 tonnya ditarik tipping fee sebesar Rp 500.000, maka tiap tahunnya Pemprov DKI Jakarta harus membayar setidaknya Rp 1,4 Triliun kepada Investor sebagai biaya pengelolaan sampah," kata Justin berdasarkan keterangannya. Selasa (24/5).

"Kalau perjanjiannya jangka panjang hingga 25 tahun, maka akan lebih dari 25 Triliun rupiah yang harus digelontorkan ke investor, itupun dengan catatan kuantitas sampah harian tersebut tidak bertambah dan tipping fee tidak naik dalam 25 tahun," tambah Justin.

Oleh karena itu, Justin menyarankan agar pembangunan ITF sebaiknya menggunakan dana APBD dengan sistem multiyears atau tahun berjangka. Misalnya, biaya pema-

ngunan ITF dibagi menjadi empat tahun sehingga lebih memungkinkan menggunakan anggaran daerah.

"Sebaiknya Pemprov mulai memikirkan untuk mengang-garkan pembangunan ITF di APBD mengingat APBD 2023 saat ini masih dalam tahap perencanaan. Jangan sampai membangun proyek yang akan membebani keuangan kita kelak," tutup Justin dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini.

Sementara itu Pemerintah DKI Jakarta masih menunggu persetujuan dari DPRD DKI Jakarta terkait proyek pengelolaan sampah melalui ITF Sunter, Jakarta Utara menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Proyek yang digadang mene-lan biaya Rp 5 triliun itu awalnya melibatkan investor, namun belakangan rekanan PT Jakpro mengundurkan diri karena per-soalan pendanaan. **(faf)**